PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Senin Tanggal: 20 Maret 2017 Halaman: 2

LPJ DISERAHKAN LANGSUNG KE BPK

Syarat Tak Lengkap, Dana Banpol Urung Cair

YOGYA (KR) - Proses pencairan dana bantuan politik (banpol) tahun ini bakal diproses lebih awal. Bagi parpol yang tidak melengkapi persyaratan, maka dana banpol pun urung dicairkan. Syarat utamanya ialah laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana banpol tahun sebelumnya.

"LPJ itu langsung diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika sudah ada rekomendasi dari BPK, maka baru bisa kami proses untuk tindak lanjut pencairan," ungkap Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogya Sukamto, Minggu (19/3).

Parpol yang berhak menerima dana banpol adalah partai yang memiliki kursi di lembaga legislatif. Di DPRD Kota Yogya terdapat delapan parpol yang berhak atas bantuan tersebut. Masing-masing ialah PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, NasDem, dan Demokrat.

Namun, sejak tahun kemarin ada satu parpol yang belum dapat menerima dana banpol, yakni PPP. Hal ini karena berlarut-larutnya persoalan dualisme kepengurusan partai politik. Pasalnya, selain ada rekomendasi dari BPK, parpol juga wajib menyerahkan surat keputusan kepengurusan dari pusat. "Khusus untuk Partai Golkar, baru dapat mencairkan bantuan tahun lalu setelah permasalahan dualisme kepengurusan dapat diselesaikan," jelas Sukamto.

Sukamto menambahkan, besaran dana banpol yang akan diterima tiap parpol pada tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Jumlah bantuan ditetapkan berdasarkan total perolehan suara tiap partai politik. Bantuan terbesar diterima oleh PDIP sebesar Rp 266,1 juta, sedangkan bantuan terkecil diterima Partai NasDem dengan nilai Rp 27,1 juta. "Penggunaan bantuan pun sudah diatur, yaitu 60 persen untuk kebutuhan pendidikan politik, dan 40 persen untuk kebutuhan administrasi," tandasnya.

Sukamto menambahkan, jika tahun-tahun sebelumnya dana banpol cenderung dicairkan mendekati akhir tahun, maka kali ini diharapkan bisa dilakukan sebelum pertengahan tahun. Batas akhir penyampaian LPJ ke BPK pun dibatasi akhir bulan ini. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005